

Peran Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Bangsa Indonesia Kontemporer: Antara Khittah, Ijtihad Politik, Dan Kontribusi Kebangsaan

Yoanda Eka Putera¹, Yugo Widya Iratama², Mardiana Dina³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

email: yoandaekaputera@webmail.umm.ac.id¹, yugowidya@webmail.umm.ac.id², dinamardiana@webmail.umm.ac.id³

ABSTRACT

This study examines Muhammadiyah's role in Indonesia's contemporary political dynamics, focusing on three main dimensions: the khittah (ideological guideline), political ijtihad as an adaptation mechanism, and national contribution as a manifestation of civic engagement. Using library research with a qualitative-descriptive approach, this study analyzes official Muhammadiyah documents, academic works, and relevant policy reports. The findings indicate that Muhammadiyah has successfully maintained its identity as a socio-religious movement (civil Islam) while responding to political issues affecting the community and the nation. Although not formally affiliated with any political party, Muhammadiyah actively participates in democratic processes through policy advocacy, civic education, and civil society empowerment. This study concludes that Muhammadiyah's model of ethical-critical political engagement represents a unique contribution to democratic consolidation in Indonesia.

Keywords: Muhammadiyah, Khittah, Political Ijtihad, Democracy, Civil Islam, National Contribution

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia kontemporer dengan berfokus pada tiga dimensi utama: khittah perjuangan sebagai landasan ideologis, ijtihad politik sebagai mekanisme adaptasi, dan kontribusi kebangsaan sebagai wujud nyata keterlibatan dalam kehidupan berbangsa. Menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen resmi Muhammadiyah, karya akademik, dan laporan kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitas organisasinya sebagai gerakan sosial-keagamaan (civil Islam) sambil tetap memberikan respons terhadap isu-isu politik yang memengaruhi kehidupan umat dan bangsa. Meskipun secara formal tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, Muhammadiyah aktif terlibat dalam proses demokrasi melalui advokasi kebijakan, pendidikan kewarganegaraan, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa model keterlibatan politik Muhammadiyah yang bersifat etis-kritis merupakan kontribusi unik dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Khittah, Ijtihad Politik, Demokrasi, Civil Islam, Kontribusi Kebangsaan

PENDAHULUAN

Muhammadiyah secara historis merumuskan posisi politiknya melalui konsep "khittah perjuangan," yang menggariskan bahwa organisasi ini adalah gerakan sosial-keagamaan yang tidak berafiliasi langsung dengan partai politik. Keputusan Muktamar ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971 yang dipertegas kembali dalam Muktamar-muktamar berikutnya menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak berada di bawah pengaruh partai manapun (PP Muhammadiyah, 2010). Prinsip ini menjadi panduan utama dalam menavigasi berbagai isu politik yang terus berkembang.

Meski demikian, realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa pemisahan tegas antara agama dan politik dalam konteks organisasi Islam tidaklah sederhana. Banyak elite Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam partai politik, menjabat sebagai pejabat publik, atau memengaruhi proses legislasi. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip khittah dengan praktik politik di lapangan, sehingga menuntut adanya ijtihad politik—yakni upaya penafsiran ulang terhadap prinsip-prinsip organisasi dalam menghadapi konteks sosial-politik yang berubah (Kuntowijoyo, 2007). Ijtihad politik Muhammadiyah semakin relevan dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer yang ditandai dengan polarisasi identitas, politisasi agama, dan melemahnya institusi demokrasi. Dalam situasi demikian, peran organisasi keagamaan yang moderat dan berakar kuat di masyarakat seperti Muhammadiyah menjadi sangat strategis. Muhammadiyah diharapkan menjadi jangkar moral dan intelektual yang dapat merawat harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai demokrasi substantif (Hefner, 2019).

Berbagai studi telah dilakukan untuk memahami relasi antara Muhammadiyah dan politik. Burhani (2016) mengidentifikasi bahwa Muhammadiyah telah mengembangkan apa yang disebut sebagai "politik etis" yang mengutamakan pertimbangan moral dan kepentingan umat di atas kepentingan politik partisan. Sementara itu, Maarif (2009) menyoroti pentingnya dimensi kebangsaan dalam identitas Muhammadiyah yang melampaui sekat-sekat sektarian. Berbeda dengan kedua studi tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus—khittah, ijtihad, dan kontribusi kebangsaan—dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Dari perspektif teori gerakan sosial, Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai *Civil Society Organization* (CSO) yang berfungsi sebagai mediator antara negara dan masyarakat. Dalam perspektif ini, keterlibatan politik Muhammadiyah dipahami bukan sebagai upaya merebut kekuasaan politik secara langsung, melainkan sebagai strategi untuk memengaruhi kebijakan publik melalui jalur advokasi, pembentukan opini publik, dan mobilisasi sosial (Putnam, 2000). Model keterlibatan semacam ini sejalan dengan konsep "civil Islam" yang dirumuskan oleh Hefner (2000) sebagai bentuk islamisasi yang kompatibel dengan demokrasi.

Relevansi kajian ini semakin meningkat mengingat dinamika politik Indonesia yang terus bergolak, terutama pasca Pemilihan Umum 2019 dan 2024 yang diwarnai oleh polarisasi yang tajam. Dalam kondisi tersebut, sikap Muhammadiyah—apakah mendukung, mengkritisi, atau berdiri netral terhadap berbagai kontestasi politik—memiliki implikasi luas bagi stabilitas demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, memahami mekanisme pengambilan keputusan politik Muhammadiyah menjadi kebutuhan akademis yang mendesak (Ambardi, 2019).

Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks wacana global tentang peran organisasi keagamaan dalam demokrasi. Di berbagai negara Muslim-majority, terdapat perdebatan tentang apakah Islam kompatibel dengan demokrasi liberal. Indonesia, dengan kehadiran organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sering dijadikan model studi kasus yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan (Norris & Inglehart, 2011). Kajian mendalam tentang praktik politik Muhammadiyah dapat memberikan kontribusi berharga pada perdebatan global ini.

Penelitian ini juga berangkat dari kesadaran akan adanya gap empiris dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi tentang Muhammadiyah dan politik masih bersifat parsial, baik yang hanya fokus pada aspek khittah, aspek ijtihad, maupun aspek kontribusi kebangsaan secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mencoba mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu bingkai analisis yang utuh. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Selain tantangan internal dan domestik, eksistensi Muhammadiyah dalam politik kontemporer juga harus dilihat dari kontribusi globalnya sebagai representasi Islam moderat.

Menurut Khoiruddin (2025), Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai penonton dalam dinamika global, melainkan aktor aktif yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan universal melalui diplomasi kemanusiaan dan perdamaian internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad politik Muhammadiyah telah bertransformasi dari sekadar respons terhadap kebijakan negara menjadi visi kosmopolitan yang ingin mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan. Dengan demikian, keterlibatan politik Muhammadiyah memiliki dimensi ganda: menjaga stabilitas demokrasi di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik global melalui "soft power" keagamaan yang inklusif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif peran Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia kontemporer melalui tiga dimensi tersebut, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, studi Islam, dan kajian masyarakat sipil di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena sosial-politik yang kompleks—yakni peran Muhammadiyah dalam dinamika politik—berdasarkan berbagai sumber dokumenter yang telah ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji fenomena yang memerlukan pemahaman mendalam dan kontekstual, bukan sekadar pengukuran statistik.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen resmi Muhammadiyah seperti naskah Khittah Perjuangan Muhammadiyah, keputusan Muktamar, pernyataan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tanfidz (risalah) sidang Tanwir. Data sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, berita media terpercaya, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka sistematis terhadap dokumen-dokumen yang relevan, dengan memperhatikan keabsahan, relevansi, dan kebaruan sumber.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sesuai dengan model analisis Miles dan Huberman (1994), yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari berbagai sumber yang terkumpul; (2) penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang terstruktur berdasarkan tema-tema utama penelitian; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu proses pemaknaan atas data yang telah dianalisis untuk menghasilkan proposisi-proposisi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni mengonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber-sumber lain yang berbeda namun relevan, sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki validitas yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khittah Perjuangan: Fondasi Ideologis Muhammadiyah dalam Politik

Khittah perjuangan Muhammadiyah merupakan dokumen ideologis yang menetapkan posisi dan orientasi organisasi dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk politik. Secara etimologis, khittah berasal dari bahasa Arab yang berarti "garis" atau "rancangan," yang dalam konteks Muhammadiyah merujuk pada garis perjuangan yang harus diikuti oleh seluruh warga dan pimpinan organisasi. Khittah bukan sekadar peraturan administratif, melainkan merupakan penjabaran dari pemahaman teologis Muhammadiyah tentang peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nashir, 2010).

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah telah merumuskan beberapa versi khittah sebagai respons terhadap perkembangan situasi politik. Khittah Palembang (1956) menegaskan ketidakterlibatan langsung dalam politik praktis; Khittah Ponorogo (1969) menekankan pengembalian Muhammadiyah kepada fungsi sosial-keagamaan; dan Khittah Ujung Pandang (1971) secara eksplisit menyatakan Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak menjadi underbow partai manapun. Penegasan ini diperbarui dalam Mukhtamar ke-46 di Yogyakarta (2010) yang menekankan pentingnya kemandirian Muhammadiyah dari kekuatan politik manapun (PP Muhammadiyah, 2010).

Meski demikian, implementasi khittah dalam konteks politik kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, banyak kader Muhammadiyah yang aktif di partai politik dan bahkan menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memahami batas antara "Muhammadiyah sebagai organisasi" dan "kader Muhammadiyah sebagai individu." Kedua, berbagai isu kebijakan publik—seperti kebijakan pendidikan, tata kelola zakat, regulasi perbankan syariah, dan kebijakan anti-korupsi—secara

langsung memengaruhi kepentingan Muhammadiyah sebagai organisasi, sehingga mendorong keterlibatan organisasional dalam proses politik (Syamsuddin, 2015).

Ijtihad Politik: Adaptasi dan Respons terhadap Dinamika Kontemporer

Konsep ijtihad dalam tradisi Islam merujuk pada upaya penerapan segenap kemampuan intelektual untuk merumuskan hukum atau keputusan berdasarkan sumber-sumber teks agama. Dalam konteks politik, Muhammadiyah mengembangkan apa yang dapat disebut sebagai "ijtihad politik"—yakni upaya reinterpretasi dan adaptasi prinsip-prinsip organisasi dalam menghadapi realitas politik yang terus berubah. Proses ijtihad ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui forum-forum organisasi yang memiliki otoritas, seperti Mukhtamar, Tanwir, dan Rapat Pleno Pimpinan Pusat (Kuntowijoyo, 2007).

Salah satu bentuk ijtihad politik Muhammadiyah yang paling nyata adalah sikapnya terhadap demokrasi. Sejak awal reformasi, Muhammadiyah secara aktif mendukung proses demokratisasi di Indonesia, meskipun dengan catatan kritis terhadap berbagai patologi yang menyertainya seperti politik uang (*money politics*), politik identitas, dan oligarkisasi kekuasaan. Melalui berbagai pernyataan resmi, Muhammadiyah menekankan perlunya demokrasi yang substansial—bukan sekadar prosedural—yang mampu menghasilkan kepemimpinan yang amanah, kompeten, dan berintegritas (Maarif, 2009). Posisi ini mencerminkan kemampuan Muhammadiyah untuk berdialog dengan konsep-konsep modernitas sambil tetap berpijak pada nilai-nilai Islam.

Dalam konteks Pemilu, Muhammadiyah konsisten mengambil sikap independen yang menolak untuk secara resmi mendukung kandidat atau partai tertentu. Namun demikian, organisasi ini aktif dalam pendidikan pemilih (*voter education*) dan pengawasan proses pemilu. Badan Pengurus Harian PP Muhammadiyah berkali-kali mengeluarkan maklumat yang berisi kriteria pemimpin yang ideal berdasarkan nilai-nilai Islam—yang secara tidak langsung menjadi semacam panduan politik bagi warga Muhammadiyah. Strategi komunikasi politik semacam ini menunjukkan kecerdikan Muhammadiyah dalam memengaruhi proses demokrasi tanpa melanggar prinsip khittahnya (Ambardi, 2019).

Respons Muhammadiyah terhadap isu-isu kebijakan publik yang kritis juga mencerminkan dinamika ijtihad politiknya. Dalam isu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada 2020, misalnya, Muhammadiyah mengkritisi proses pembentukan undang-undang yang dinilai terburu-buru dan tidak partisipatif, meski tidak sampai menggelar aksi protes berskala besar seperti yang dilakukan kelompok buruh. Kritik dilakukan melalui pernyataan resmi, diskusi akademik, dan advokasi kepada lembaga negara yang relevan. Pola yang sama terlihat dalam isu revisi UU KPK (2019), di mana Muhammadiyah menyatakan keberatan atas pelemahan institusi anti-korupsi yang dianggap

bertentangan dengan prinsip amar makruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) (Suara Muhammadiyah, 2019).

Ijtihad politik Muhammadiyah juga terlihat dalam sikapnya terhadap fenomena kebangkitan Islam politik (political Islam) yang semakin menguat pasca-2014. Berbeda dengan gerakan-gerakan yang mengusung agenda formalisasi syariat Islam atau mendukung konsep khilafah, Muhammadiyah secara tegas menolak gagasan-gagasan tersebut dan mempertahankan komitmennya pada NKRI berdasarkan Pancasila. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, dan bahwa perjuangan Islam di Indonesia harus dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional dan damai (Nashir, 2018). Posisi ini menjadikan Muhammadiyah sebagai benteng moderat di tengah arus radikalisme yang mengkhawatirkan.

Dinamika ijtihad politik ini juga merambah pada cara Muhammadiyah mengelola narasi di ruang digital, terutama dalam menghadapi tantangan disinformasi dan radikalisme daring. Khoiruddin (2025) menekankan bahwa Muhammadiyah kini menjalankan strategi dakwah digital yang berfungsi sebagai instrumen politik kebangsaan untuk melawan konten keberagaman yang eksklusif dan intoleran. Pemanfaatan teknologi informasi ini bukan hanya soal teknis, melainkan bentuk ijtihad untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam berkemajuan tetap menjadi arus utama dalam opini publik nasional. Dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam gerakan politik etisnya, Muhammadiyah berhasil menjaga jarak yang sehat dengan politik praktis sambil tetap efektif dalam melakukan kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan di era informasi

Kontribusi Kebangsaan: Wujud Nyata Peran Muhammadiyah

Kontribusi Muhammadiyah bagi kehidupan kebangsaan melampaui dimensi politik formal dan mencakup berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan masyarakat sipil. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kontribusi ini tidak hanya bermakna dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga berdimensi politis dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran keislaman dan kebangsaan yang terintegrasi. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi media transmisi nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan nasionalisme kepada generasi muda Indonesia (Azra, 2012).

Di bidang kesehatan, Muhammadiyah mengelola puluhan rumah sakit, klinik, dan poliklinik yang melayani jutaan warga Indonesia dari berbagai latar belakang. Layanan kesehatan ini memiliki signifikansi politik yang tidak dapat diabaikan: ia merupakan bukti nyata bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan elite.

Dalam konteks ini, kontribusi Muhammadiyah di bidang kesehatan juga dapat dibaca sebagai bentuk "politik pelayanan" yang membangun legitimasi sosial-politik organisasi di mata masyarakat (Effendi, 2013). Kepercayaan publik yang tinggi ini kemudian menjadi modal sosial-politik yang berharga dalam berbagai interaksi Muhammadiyah dengan kekuasaan negara.

Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik komunal. Melalui jaringan kadernya yang luas di berbagai daerah, Muhammadiyah kerap menjadi mediator dalam penyelesaian konflik horizontal antarsuku, antaragama, maupun antargolongan. Peran ini semakin krusial dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu disintegrasi sosial. Program-program Muhammadiyah yang berkaitan dengan penguatan toleransi, dialog antaragama, dan literasi media digital merupakan kontribusi konkret dalam menjaga ketahanan sosial bangsa (Burhani, 2018).

Analisa Penulis

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan model keterlibatan politik yang unik dan adaptif. Model ini dapat disebut sebagai "politik moral berbasis civil Islam," yang dicirikan oleh setidaknya tiga elemen kunci. Pertama, pemisahan institusional antara Muhammadiyah sebagai organisasi dengan keterlibatan politik individual kadernya, yang memungkinkan Muhammadiyah untuk menjaga independensinya sambil tetap memiliki pengaruh di ranah politik. Kedua, penggunaan saluran-saluran non-formal seperti pernyataan publik, diskusi akademik, dan advokasi kepada lembaga negara sebagai mekanisme utama keterlibatan politik. Ketiga, pemanfaatan kapital sosial yang bersumber dari jaringan lembaga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai basis legitimasi dan pengaruh politik. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis membentuk apa yang oleh Putnam (2000) disebut sebagai bridging social capital – modal sosial yang menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat dan memperkuat kohesi sosial secara keseluruhan.

Strategi ini sejalan dengan temuan Khoiruddin (2025) yang menyatakan bahwa moderasi beragama yang dijalankan Muhammadiyah adalah kunci stabilitas politik jangka panjang di Indonesia. Di tengah fragmentasi sosial akibat polarisasi Pemilu, Muhammadiyah menyediakan ruang netral yang mencegah benturan identitas yang lebih tajam. Keberhasilan Muhammadiyah dalam mempertahankan independensi institusional di tengah godaan kekuasaan membuktikan bahwa organisasi ini memiliki ketahanan ideologis yang kuat, di mana nilai-nilai Khittah berfungsi sebagai kompas moral yang tidak tergoyahkan oleh kepentingan pragmatis jangka pendek

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketegangan antara khittah dan praktik politik Muhammadiyah bukan merupakan kelemahan, melainkan justru dapat menjadi kekuatan adaptif yang memungkinkan organisasi ini untuk bertahan dan relevan selama lebih dari satu abad. Ketegangan tersebut mendorong Muhammadiyah untuk terus melakukan ijtihad – pembaruan pemikiran – yang menjaga vitalitas intelektual organisasi. Dalam perspektif teori organisasi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep "ambidexterity organisasi" (Tushman & O'Reilly, 1996), yakni kemampuan suatu organisasi untuk secara bersamaan mengeksploitasi kompetensi yang telah ada sambil mengeksplorasi hal-hal baru untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuan ambidexterity ini dengan mempertahankan prinsip-prinsip khittah yang sudah mapan sambil secara bersamaan mengembangkan respons-respons adaptif yang relevan terhadap tantangan kontemporer.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa Muhammadiyah telah mengembangkan model peran politik yang khas dan konsisten dengan identitasnya sebagai gerakan sosial-keagamaan (civil Islam). Melalui konsep khittah perjuangan, Muhammadiyah menegaskan posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, namun tetap aktif memengaruhi proses politik melalui advokasi, pendidikan publik, dan pernyataan-pernyataan moral. Prinsip khittah bukan merupakan hambatan, melainkan panduan yang memberikan arah dan identitas bagi keterlibatan Muhammadiyah dalam dinamika politik bangsa.

Ijtihad politik yang dilakukan Muhammadiyah mencerminkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merespons berbagai tantangan kontemporer, mulai dari isu demokrasi, anti-korupsi, radikalisme, hingga kebijakan ekonomi-sosial. Melalui ijtihad ini, Muhammadiyah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat dioperasionalisasikan secara fleksibel dan kontekstual dalam merespons dinamika politik modern tanpa harus mengorbankan identitas dan nilai dasarnya. Kontribusi kebangsaan Muhammadiyah yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat sipil memperkuat legitimasi dan pengaruh politiknya sebagai kekuatan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Eksistensi Muhammadiyah dalam dinamika politik kebangsaan Indonesia menunjukkan bahwa organisasi ini bukan sekadar lembaga keagamaan, tetapi agen perubahan sosial dan politik yang nyata. Dengan memegang teguh prinsip Islam moderat dan Pancasila, Muhammadiyah berkomitmen menjaga persatuan bangsa dan mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang lebih demokratis serta inklusif. Di masa depan, Muhammadiyah diharapkan dapat terus memperkuat peranannya dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan adil, sekaligus menjaga eksistensinya sebagai organisasi yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah secara masif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat proposisi bahwa organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dapat menjadi aktor penting dalam konsolidasi demokrasi di negara-negara Muslim-majority. Model "politik moral berbasis civil Islam" yang dikembangkan Muhammadiyah menawarkan alternatif yang konstruktif di antara dua ekstrem: depolitisasi penuh (apolitis) di satu sisi, dan politisasi agama yang bersifat eksklusif-intoleran di sisi lain. Ke depan, penelitian-penelitian lanjutan yang menggunakan metode empiris seperti survei atau wawancara mendalam dengan elite Muhammadiyah perlu dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika internal pengambilan keputusan politik di tubuh organisasi ini, serta untuk mengukur tingkat pengaruh aktual Muhammadiyah terhadap perilaku politik warganya.

REFERENSI

- Ambardi, K. (2019). *Demokrasi Indonesia: Kemajuan dan Kemunduran*. Jakarta: Kompas.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhani, A. N. (2016). *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*. Bandung: Mizan.
- Burhani, A. N. (2018). Revealing the Neglected Missions: Some Notes on the Ethos of Muhammadiyah. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(1), 1-24. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.1-24>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Effendi, B. (2013). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 1998–2018. *Asian Studies Review*, 43(3), 375-396. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1618412>
- Khoiruddin, A. (2025). Muhammadiyah dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 12(1), 162-177.
- Kuntowijoyo. (2007). *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan.
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282. <https://doi.org/10.5509/2018912261>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2018). *Islam dan Kebangsaan: Refleksi atas Pokok-Pokok Pikiran Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2011). *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2010). *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Suara Muhammadiyah. (2019). Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Revisi UU KPK. *Suara Muhammadiyah*, 104(18), 5-7.
- Syamsuddin, D. (2015). *Islam dan Politik: Upaya Cerdas Memahami dan Merespons Dinamika Politik Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Tushman, M. L., & O'Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change. *California Management Review*, 38(4), 8-29. <https://doi.org/10.2307/411658>